

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan bentuk perlindungan hukum terhadap hak cipta atas karya sinematografi yang diunggah tanpa izin di platform digital, serta mengkaji tanggung jawab hukum platform penyedia layanan dalam konteks pelanggaran hak cipta tersebut. Latar belakang penelitian ini berangkat dari meningkatnya kasus pelanggaran hak cipta di era digital, khususnya pada konten film atau audiovisual yang disebarluaskan melalui internet tanpa izin penciptanya. Fenomena ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi, di satu sisi memberikan kemudahan akses terhadap karya, namun di sisi lain menimbulkan tantangan baru bagi perlindungan hak cipta di ruang digital.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan peraturan terkait lainnya, bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, serta pendapat para ahli hukum, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum serta ensiklopedia. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif-deskriptif, dengan menafsirkan norma hukum yang berlaku untuk menjawab permasalahan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak cipta atas karya sinematografi yang diunggah tanpa izin telah diatur secara komprehensif dalam UU Hak Cipta, khususnya melalui pengakuan terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta. Namun, dalam praktiknya pelanggaran masih kerap terjadi akibat lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran hukum di kalangan pengguna digital. Selain itu, tanggung jawab platform digital seperti YouTube bersifat terbatas karena menerapkan prinsip *safe harbour*, yaitu ketentuan yang memberi perlindungan hukum kepada platform agar tidak langsung dianggap bertanggung jawab atas konten yang diunggah pengguna, selama platform tersebut segera menghapus atau menindaklanjuti laporan pelanggaran hak cipta. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi serta penegakan hukum yang lebih efektif agar perlindungan hak cipta di ruang digital dapat berjalan optimal dan memberikan kepastian hukum bagi pencipta karya sinematografi.

Kata Kunci: Hak Cipta, Karya Sinematografi, Perlindungan Hukum.